

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzie Ridwan, 1982, HUKUM TANAH ADAT – MULTI DISIPLIN PEMBUDAYAAN PANCASILA. Dewaruci Press. Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2013, PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1991, POKOK – POKOK HUKUM ADAT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Boedi Harsono, 2000, HAK ULAYAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL. Makalah disajikan pada Seminar/Lokakarya, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum USU di Medan. Medan.
- _____ 2007, HUKUM AGRARIA INDONESIA. SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG = UNDANG POKOK AGRARIA. ISI DAN PELAKSANAANNYA. JILID 1 HUKUM TANAH NASIONAL. Djambatan. Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2013, HUKUM ADAT INDONESIA, EKSISTENSI DALAM DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA. Nuansa Aulia. Bandung.
- Darda Syahrizal, dkk, 2014, UNDANG-UNDANG AGRARIA & APLIKASINYA, MENCAKUP ISI DAN SISTEMATIKA PERPASAL BESERTA PENJELASANNYA, LENGKAP DENGAN: PENGERTIAN AGRARIA DAN HUKUM AGRARIA, SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA, ASAS-ASAS UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA, TUJUAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA. Dunia Cerdas. Jakarta.

Effendi Perangin, 1986, HUKUM AGRARIA DI INDONESIA SUATU TELAAH DARI SUDUT PANDANG PRAKTISI HUKUM. CV. RAJAWALI. Jakarta.

Eddy Ruchiat, 1986, POLITIK PERTANAHAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UUPA (UU No. 5 Tahun 1960). Alumni. Bandung.

Erni Djun'astuti, 2011, HUKUM ADAT. Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum. Pontianak.

Hazairin, 1981, TUJUH SERANGKAI TENTANG HUKUM. Bina Aksara. Jakarta.

Hesti Hastuti, 2000, PENELITIAN HUKUM ASPEK HUKUM PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT DALAM OTONOMI DAERAH. Badan pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

H.A.W Widjaja, 2010, OTONOMI DESA MERUPAKAN OTONOMI YANG ASLI, BULAT DAN UTUH. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Moh Koesno, 1992, HUKUM ADAT SEBAGAI SUATU MODEL. Mandar Maju. Bandung.

Maria S. W. Sumardjono, 1982, PUSPITA SERANGKUM ANEKA MASALAH HUKUM AGRARIA. Andi Offset. Yogyakarta.

_____, 2001, KEBIJAKAN PERTANAHAN ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI. Buku Kompas. Jakarta.

_____, 2007, KEBIJAKAN PERTANAHAN ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI. Kompas. Jakarta.

Mulya, 15 April 2014, *Hukum Tanah Indonesia*.
<http://mulyaningtyas.blogspot.com/2014/04/hukum-tanah-indonesia.html> (11 April 2014 pukul 01.49).

Muliadi Nur, 10 November 2014, *Pojok Hukum Media Belajar Hukum dan Ilmu Hukum*.
Pojokhukum.blogspot.com/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html?m=1 (23 Maret 2008 pukul 11.12).

Purnadi Purbacara, dkk, 1982, HAK MILIK KEADILAN DAN KEMAKMURAN TINJAUAN FALSAFAH HUKUM. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Rafael Edy Bosko, 2006, HAK – HAK MASYARAKAT ADAT DALAM KONTEKS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM. ELSAM – Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat. Jakarta.

Rosalina, 2010, EKSISTENSI HAK ULAYAT DI INDONESIA. Jurnal Sasi Vol.16. No.3.

Surojo Wignjodipuro, 1982, PENGANTAR DAN ASAS – ASAS HUKUM ADAT. PT. Gunung Agung. Jakarta.

Sumitro Ronny Hanityo, 1990, METODELOGI PENELITIAN HUKUM DAN JURIMETRI. Ghalia Indonesia.

Suhariningsih, 2009, TANAH TERLANTAR, ASAS DAN PEMBAHRUAN KONSEP MENUJU PENERTIBAN. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.

Sinarsindo, Comp, 2014, BURGERLIJK WETBOEK KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DISERTAI PENJELASANNYA DILENGKAPI DENGAN: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. Sinarsindo Utama.

Ter Haar, dkk, 1973, HUKUM ADAT DALAM POLEMIK ILMIAH. Bhratara. Jakarta.

Ter Haar Bzn, Diindonesiakan oleh K.Ng.Soebakti Poesponoto 1999, 1981, ASAS – ASAS DAN SUSUNAN HUKUM ADAT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2014, *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Desa*. CV. Nuansa Aulia. Bandung.

Y. C. Thambun Anyang, 2002, KEDUDUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH ADAT DI KALIMANTAN BARAT. PIDATO PENGUKUHAN JABATAN GURU BESAR DALAM ILMU ADAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Tanjungpura Pontianak. Pontianak.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.